

Asia Europe Meeting (ASEM) dalam Perspektif Ekonomi Politik Global

Oleh:

Aleksius Jemadu,

Abstract

The Asia Europe Meeting (ASEM) is a process of an informal dialogue and cooperation among 15 European states and 10 member states of ASEAN. The aim of this paper is to reserach the ASEM from the international / global political economic perspectives

Pendahuluan

Asia Europe Meeting (ASEM) merupakan sebuah proses kerjasama dan dialog informal yang beranggotakan 15 negara anggota European Union (EU) dan the European Commission serta 10 negara Asia (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Philipina, Brunei, Vietnam, Cina, Jepang dan Korea Selatan. Karena menggabungkan negara-negara dari dua region yang berbeda maka kerjasama informal ini bersifat inter-regional. Di samping itu di masing-masing region sebenarnya sudah ada kerjasama regional yang sudah lebih dahulu dibentuk seperti ASEAN, AFTA, APEC, dan ASEAN + 3 di Asia dan Uni Eropa. Tingkat integrasi dan soliditas kedua region berbeda-beda di mana Uni Eropa sudah mencapai mata uang tunggal *euro* sedangkan integrasi ekonomi di Asia masih jauh dari kenyataan. Secara sepintas kita melihat bahwa ASEM terdiri dari negaranegara dengan latar-belakang yang sangat beragam serta tingkat pembangunan sosial ekonomi yang sangat bervariasi. Selain itu

mereka memiliki system ideology dan rezim politik yang berbeda-beda pula. Sebagian besar negara-negara EU telah memiliki demokrasi yang terkonsolidasi dengan system nilai liberal sedangkan negaraneegara di Asia bervariasi dari demokrasi yang sudah mapan seperti Jepang sampai pada Cina dan Vietnam yang masih mempertahankan rezim komunis yang otoriter. Meskipun keragaman yang ada sangat kompleks namun dalam dunia yang semakin interdependen kenyataan ini tidak menjadi hambatan bagi negara-negara anggota untuk menjalin kemitraan yang dialogis demi mencapai tujuan bersama.

ASEM dibentuk melalui KTT yang pertama di Bangkok pada tahun 1996. Dialog dalam kerangka ASEM bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya atas dasar prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara. Meskipun hanya merupakan forum dialog informal, ASEM telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan diselenggarakan 4 KTT sejak tahun 1996. Ketiga KTT yang terakhir

diadakan di London (1998), Seoul (2000) dan Copenhagen (2002). Makalah ini akan menyoroti makna kehadiran ASEM dari perspektif ekonomi politik global di mana negara-negara berusaha untuk memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan nasionalnya melalui berbagai bentuk kerjasama internasional baik yang bersifat multilateral, regional, inter-regional dan bahkan bilateral berupa *bilateral free trade agreements* (BFTAs) seperti yang gencar dilakukan oleh Singapore. Meningkatnya interdependensi ekonomi sebagai isu sentral pasca-perang dingin menjadi faktor utama yang menggerakkan proses ekonomi pada level global dan regional. Terciptanya mata uang tunggal di Uni Eropa secara signifikan mempengaruhi efisiensi dalam transaksi ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Karena itu melalui European Commission negara-negara anggota Uni Eropa merasa perlu menyatukan suara dalam menyikapi persaingan ekonomi di Asia Pasifik di samping usaha individual masing-masing anggota untuk berkiprah secara produktif di wilayah yang dinamis ini. Untuk membahas signifikansi ASEM terhadap disiplin hubungan internasional, tiga perspektif utama dalam ekonomi politik internasional akan digunakan yaitu perspektif nasionalis, liberal dan marxis. Tetapi sebelum sampai ke pembahasan tersebut terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan *setting* internasional pembentukan ASEM termasuk sejarah interaksi Eropa dan Asia, arah perkembangan terkini ASEM, peluang dan tantangan yang dihadapi serta dampak kehadiran ASEM dalam konteks politik global khususnya yang berkaitan dengan isu terorisme internasional. Sebagai salah satu

negara ASEAN yang terlibat dalam ASEM posisi Indonesia juga dianalisis untuk melihat sejauhmana kehadiran Indonesia dalam forum sudah dimanfaatkan secara optimal atau justru tenggelam dalam dominasi negara-negara lain yang lebih progresif dan kreatif memperjuangkan kepentingannya.

Tinjauan historis interaksi Eropa – Asia dan setting internasional pembentukan ASEM

Kontak yang terjadi antara Eropa dan Asia sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad 16 dan 17 secara berturut-turut Portugis, Spanyol dan Belanda datang ke Asia Tenggara baik dalam rangka misi perdagangan maupun tujuan penyebaran agama. Inggris, Perancis dan Jerman juga mengembangkan wilayah jajahannya di Asia Tenggara sehingga secara signifikan membawa dampak politik dan keamanan di negara-negara jajahannya setelah Perang Dunia II. Jadi, secara historis interaksi Eropa dan Asia sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Perkembangan hubungan tersebut tidak selamanya diwarnai oleh sikap-sikap damai karena konflik bersenjata atau perang juga terjadi terutama yang berkaitan dengan perang kemerdekaan untuk membebaskan diri dari penguasa kolonial Eropa. Misalnya, Vietnam dan Indonesia harus melewati perjuangan bersenjata terhadap Perancis dan Belanda sebelum keduanya mencapai kemerdekaan. Cina juga terlibat konflik dengan Inggris. Jepang yang menganggap dirinya sebagai pemimpin dan pelindung Asia pada masa Perang Dunia II harus menghadapi

kekuatan militer negara-negara sekutu yang dipimpin AS sebelum akhirnya kalah dalam perang dunia II. Sejarah kolonial menunjukkan bahwa pada masa lalu hubungan ini dicirikan oleh kedudukan yang tidak sederajat antara kedua wilayah. Eropa berada pada posisi sebagai negara dominan dibandingkan dengan negara-negara Asia. Sejauhmana hubungan yang tidak setara ini masih mempengaruhi interaksi dalam kerangka ASEM merupakan pertanyaan kritis yang penting untuk dikaji oleh para penstudi hubungan internasional. Dapatkah interdependensi ekonomi yang tidak simetris membawa keuntungan bagi semua participants seperti yang diklaim oleh kaum neoliberal?

Pada tahun 1980an negara-negara Eropa Barat mulai mengakui adanya tantangan ekonomi dari Jepang yang berhasil tampil sebagai negara industri yang mulai menyaingi dominasi AS sebelumnya. Keberhasilan Jepang ini diikuti oleh negara-negara industri baru di Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapore dan Taiwan. Sementara sebelum krisis ekonomi Asia tahun 1997, beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pada awal decade 1990an keterbukaan ekonomi Cina juga mulai menampilkan hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang semakin pesat. Rangkaian keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Tenggara pada decade 1980an dan 1990an ini telah memunculkan optimisme tentang potensi pasar dan investasi di Pasifik yang ditunjang oleh

semakin besarnya potensi wilayah ini secara global. Meskipun krisis Asia agak menyurutkan optimisme “abad Pasifik” namun kenyataan itu tidak mengurangi arti penting wilayah Asia Pasifik secara ekonomi. Apalagi kalau penduduk Asia Tenggara dan Timur digabungkan maka jumlahnya bisa mencapai sepertiga penduduk dunia. Karena itu tidaklah mengherankan kalau dua pusat ekonomi dunia lainnya yaitu Amerika Utara (AS) dan Uni Eropa sangat tertarik untuk menjalin hubungan ekonomi (perdagangan dan investasi) secara lebih dekat dan terkoordinasi dengan kawasan ini. Antusiasme AS dalam mendukung terbentuknya APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) tidak terlepas dari strateginya di wilayah Asia Pasifik yang selalu mencegah terbentuknya kerjasama regional dalam bidang ekonomi dan keamanan yang tidak menyertakan AS (Barry Buzan, 1998). Apalagi wilayah Asia Timur memiliki makna strategis bagi AS mengingat mitra dagang utamanya yaitu Jepang ada di wilayah ini. Selain itu secara histories AS telah terikat dengan perjanjian bilateral dengan Jepang, Korea Selatan dan Australia dalam bidang keamanan. Dalam konteks ini kita melihat bahwa kemunculan ASEM merupakan antisipasi yang dilakukan Uni Eropa untuk menanggapi instrumentalisasi APEC oleh AS sejak awal 1990an. Sementara itu berkembang wacana sejak pertengahan decade 1990an bahwa AS telah memproyeksikan NAFTA (*North American Free Trade Agreements*) menjadi FTAA (*Free Trade Agreement of the American Areas*) yang menggabungkan semua negara di *Western*

Hemisphere di bawah kepemimpinan ekonomi AS. Dalam konteks persaingan global ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauhmana perkembangan ASEM ditentukan oleh proses *triadization* atau *triangular world* berupa persaingan segitiga antara AS, Jepang dan Uni Eropa. Bagaimana negara-negara peripherel secara sosial ekonomi memproyeksikan peranannya dalam proses persaingan ekonomi tersebut?

Karakteristik Dasar Hubungan Ekonomi Eropa dengan Asia: Pola Perdagangan, Investasi dan Bantuan Luar Negeri

Tiga pilar hubungan ekonomi antara Eropa dengan Asia melalui perdagangan, investasi dan bantuan luar negeri menunjukkan bahwa adanya interaksi yang cukup intensif dalam beberapa decade terakhir. Statistik perdagangan dari tahun 1990an mengungkapkan bahwa Jepang merupakan negara dominan di Asia Pasifik dengan volume perdagangan yang tinggi dengan Uni Eropa. Kendati demikian Cina dan negara-negara ASEAN menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan yang cukup signifikan. Dominasi Jepang sebagai negara industri paling maju di Asia tidaklah mengherankan mengingat kepemimpinan ekonomi Jepang di Asia Timur sejak adanya Plaza Accord pada pertengahan 1980an yang menggerakkan relokasi industri Jepang di Asia Timur dan Tenggara demi mempertahankan daya saingnya di pasar global. Untuk tahun 1994 impor EU dari 10 negara Asia menempatkan Jepang pada posisi teratas dengan jumlah 45%, menyusul

ASEAN dengan 27%, Cina 21% dan Korea Selatan 8%. Sedangkan ekspor EU ke Asia pada tahun yang sama paling tinggi adalah ASEAN sebesar 36%, Jepang 34%, Cina 16% dan Korea Selatan 13%. Ekspor EU ke 10 negara Asia menunjukkan dominasi Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Ekspor Jerman ke Asia adalah sebesar 33%, posisi berikutnya adalah Inggris dan Perancis masing-masing 15% dan 14%. Dalam hal impor Jerman juga berada pada urutan teratas dengan jumlah sebesar 29%, diikuti Inggris 21% dan kemudian menyusul Perancis dan Belanda dengan masing-masing 10% (Michael Smith, 1998 yang mengutip Eurostat, 1996). Dari data perdagangan ini kita melihat bahwa di masing-masing region baik Eropa maupun Asia ada pelaku-pelaku utama yang meraih porsi terbesar dalam interaksi perdagangan. Sejahteranya negara-negara besar tersebut khususnya Jerman dan Jepang mempengaruhi kerjasama ekonomi dalam kerangka ASEM dan bagaimana mereka memenangkan persaingan bisnis dengan negara-negara besar lainnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Menurut data dari European Commission 10 negara Asia yang tergabung dalam ASEM secara agregat merupakan mitra dagang kedua terbesar (14,8%) dari Uni Eropa sesudah AS (21,9%) dalam hal volume ekspor and impor (European Commission, 2002).

Untuk melihat posisi Indonesia dalam hubungannya dengan Uni Eropa kita perlu membuat perbandingan di kalangan negara-negara ASEAN. Meskipun

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara ternyata volume perdagangan dengan Uni Eropa masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dua negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia. Misalnya, pada tahun 1993 nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa adalah sebesar 5,4 milyar US\$. Sedangkan nilai ekspor Malaysia dan Singapore masing-masing mencapai 7 milyar US\$ dan 10,8 milyar US\$. Delapan tahun kemudian, tahun 2001, peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan dua negara tersebut karena hanya mencapai 7,7 milyar US\$. Sedangkan Malaysia dan Singapore mengalami peningkatan yang cukup pesat dan masing-masing mencapai 15,5 milyar US\$ dan 16,2 milyar US\$ (European Commission, 2001). Data ini bisa ditafsirkan sebagai bukti bahwa baik daya saing maupun kemampuan memanfaatkan pasar Uni Eropa yang dimiliki Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan tetangganya di Asia Tenggara. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan kalangan bisnis Indonesia untuk mengatasi ketertinggalannya?

Aliran modal melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) antara Eropa dan Asia juga berlangsung cukup signifikan. Meskipun pencapaian Uni Eropa dalam hal FDI ke Asia Timur dan Tenggara masih berada di bawah Jepang dan AS, namun kehadiran investor Uni Eropa di kawasan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Misalnya, untuk periode 1986 – 1994 dari jumlah FDI sebesar 146 milyar US\$ ke Asia Timur (China, Indonesia, Malaysia, Philipina

dan Thailand) Uni Eropa memberikan kontribusi 10% dibandingkan dengan 18% dari Jepang dan 11% dari AS. Untuk tahun 2000 dan 2001 Uni Eropa telah menjadi investor kedua terbesar di ASEAN sesudah Jepang (European Commission, 2002). Untuk tahun 2001 Uni Eropa merupakan salah satu investor utama di Indonesia dengan kontribusi sebesar hampir 10% dari total investasi. Persentase ini masih jauh di atas AS yang hanya mencapai 0,8%. Di kalangan negara-negara Uni Eropa Inggris merupakan investor terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 8% dari total investasi (BPS, 2002). Dari sudut pandang investasi hubungan Indonesia dengan Uni Eropa lebih penting daripada hubungan dengan AS mengingat kecilnya angka investasi AS di Indonesia.

Jalur ketiga hubungan ekonomi Asia dengan Eropa menggunakan bantuan luar negeri yang ditujukan ke negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Ada tiga bentuk bantuan yang diberikan yaitu bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan dan bantuan kerjasama ekonomi (Michael Smith, 1998). Bisa dipastikan bahwa Indonesia merupakan salah satu penerima bantuan luar negeri yang cukup besar mengingat kepterpurukan ekonomi Indonesia sesudah krisis tahun 1997. Untuk periode 2002 – 2006 diperkirakan Indonesia akan mendapat bantuan dari Uni Eropa sebesar 216 juta euro (European Commission, 2002). Dibandingkan dengan jalur hubungan perdagangan dan investasi, jalur ini berpotensi menciptakan hubungan yang tidak sejajar karena negara donor menerapkan kondisionalitas yang cenderung

memberatkan negara recipient. Sejuahmana ASEM memfasilitasi hubungan antara negara-negara pengutang dengan negara-negara donor masih menjadi tanda tanya besar mengingat penyelesaian masalah utang luar negeri masih didominasi oleh lembaga-lembaga lain seperti IMF, Bank Dunia dan Paris Club di mana negara pengutang secara individual harus menghadapi kekuatan kolektif negara-negara donor. Dalam konteks ini persoalan bargaining power masing-masing negara menjadi sangat penting mengingat ketercapaian tujuan diplomasi internasional sangat ditentukan oleh dukungan *national power* yang dimiliki oleh suatu aktor negara.

Kerjasama dan Dialog Pada Berbagai Tingkatan: Peluang dan Tantangan

Meskipun pada awalnya pembentukan ASEM merupakan inisiatif pemerintah, namun dalam perkembangannya ASEM juga mencakup kerjasama dan dialog pada level non-state actors yaitu kalangan usahawan dan civil society (think tanks, universities, research institutions and NGOs). Untuk kalangan pengusaha swasta, misalnya, telah terbentuk Asia – Europe Business Forum (AEBF) yang setiap tahun mengadakan pertemuan untuk membicarakan kepentingan dunia bisnis kedua belah pihak. Untuk memfasilitasi kontak bisnis antara Eropa dan Asia telah diciptakan ASEMConnect.com, sebuah *web site* yang berfungsi sebagai *electronic meeting place* bagi 26 mitra ASEM. Melalui *web site* ini mereka bisa membangun link demi membangun *business*

networks ke setiap negara anggota (<http://www.asemconnect.com.sg/aboutus.html> diakses 30 September 2003).

Pada level society terbentuk *Asia Europe People's Forum* (AEPF). Tujuan yang ingin dicapai oleh AEPF antara lain membuat proses kemitraan ASEM semakin transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsure-unsur *civil society* di Asia maupun Eropa. Selain itu AEPF juga berupaya untuk meningkatkan keterpaduan antara kerjasama ekonomi, dialog politik dan pemajuan kerjasama kebudayaan kedua pihak. Dialog multilevel ini sejalan dengan tiga pilar dalam proses ASEM yang mencakup dialog politik, keamanan dan ekonomi, serta pendidikan dan kebudayaan. AEPF juga memperjuangkan isu-isu kemasyarakatan seperti pemberantasan kemiskinan, HAM, kesetaraan jender, ketimpangan sosial ekonomi antara Asia dan Eropa (<http://www.iiias.nl/asem/community/ngo/aepf.html> diakses 30 September 2003). Tentu masih bisa dipersoalkan sejauhmana ketiga pilar proses kemitraan ini konsisten satu dengan yang lain mengingat kepentingan yang diperjuangkan oleh negara dan pengusaha belum tentu sejalan dengan kepentingan akar rumput yang diwakili oleh organisasi *civil society* seperti kalangan NGOs. Misalnya, dalam kasus Indonesia, sementara pemerintah berjuang untuk mendapatkan peningkatan bantuan luar negeri pihak NGOs (khususnya INFID = *International NGO Forum on Indonesian Development*) memprotes dominasi negara-negara donor yang membebani penduduk miskin dengan kewajiban mengembalikan utang luar negeri.

Pada level pemerintahan telah banyak hasil yang dicapai oleh ASEM sejak KTT pertama di Bangkok tahun 1996 sampai pada KTT terakhir di Copenhagen tahun 2002 yang diungkapkan baik melalui *Chairman's Statements*, *Ministerial Communiqués* maupun deklarasi bersama tentang berbagai bentuk kerjasama konkrit dalam berbagai bidang. Setiap dua tahun ASEM mengadakan KTT (The Asia – Europe Summit) yang dihadiri oleh semua kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara anggota serta presiden Komisi Eropa. Salah satu tujuan KTT adalah untuk menjamin komitmen setiap anggota pada level pengambilan keputusan yang tertinggi untuk kemudian dijabarkan dalam kebijakan pada tingkat kementerian atau pejabat tinggi masing-masing negara. Secara operasional, proses ASEM di bawah forum KTT dilakukan melalui *Senior Officials' Meeting* (SOM) di mana para menteri luar negeri bertemu setiap tahun untuk membahas isu-isu politik yang menjadi kepedulian bersama. Untuk isu-isu ekonomi dibentuk forum khusus yang disebut *Senior Officials Meeting on Trade and Investment* (SOMTI) yang tujuannya memfasilitasi perdagangan dan promosi investasi.

Dalam KTT ASEM IV tanggal 2 – 4 September 2002 di Copenhagen Denmark telah disepakati beberapa hal penting yang dicantumkan dalam *Chairman's Statement*. Pertama, para kepala negara menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme global menyusul peristiwa 11 September 2001 di

AS. Dalam kaitan ini ASEM menekankan bahwa perang melawan terorisme harus didasarkan pada peran utama PBB dan Piagam PBB. Dengan kata lain ASEM secara *implicit* menolak unilateralisme dan mengedepankan multilateralisme. Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini KTT IV ASEM mengeluarkan dua dokumen penting yaitu: *Declaration on Cooperation against International Terrorism* dan *Cooperation Programme on Fighting International Terrorism*. Selain itu dihasilkan juga *Political Declaration for Peace on the Korean Peninsula*. Dalam bidang ekonomi disepakati beberapa hal penting seperti peningkatan kerjasama antara kedua region, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, transparan dan adil melalui mekanisme WTO, serta penanggulangan hambatan perdagangan dan investasi (http://europa.eu.int/external_relations/asem diakses tanggal 1 Oktober 2003).

Menurut Michael Smith (1998) ada beberapa sumber ketegangan dan kontradiksi dalam tubuh ASEM. Pertama, kepentingan komersial yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi sering berbenturan dengan perbedaan persepsi tentang nilai-nilai tertentu seperti HAM, *good governance*, *non-intervention*, dsbnya. Sebagai contoh, Uni Eropa dan ASEAN memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi perkembangan politik di Myanmar. Sementara ASEAN sudah menerima Myanmar sebagai anggota dan menempuh jalan dialog untuk pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, Uni Eropa cenderung mengisolasi rezim militer

Myanmar dan bahkan menerapkan embargo ekonomi. Kedua, ada pertentangan antara *closed regionalism* yang menjadi preferensi Uni Eropa dengan *open regionalism* dalam kerangka APEC yang diterapkan oleh negara-negara Asia. Ketiga, sehubungan dengan point kedua Uni Eropa menghendaki pelebagaan kerjasama sedangkan negara-negara Asia lebih menyepakati mekanisme yang informal melalui proses *mutual adjustment*. Keempat, adanya pertentangan dan konflik kepentingan antara berbagai level kerjasama dan dialog. Hubungan antar pemerintah, misalnya, lebih menekankan isu-isu yang sejalan dengan kebijakan domestik masing-masing sedangkan NGOs lebih peduli dengan kepentingan *grassroots* yang sering menjadi korban kebijakan pemerintah dan kepentingan *transnational capital* yang dimotori oleh perusahaan multinasional.

Penutup: Signifikansi ASEM untuk Studi Hubungan Internasional

Dari uraian di atas kita melihat bahwa ASEM sebagai forum dialog dan kemitraan interregional Asia dan Eropa muncul dan berkembang karena berbagai kekuatan dan dorongan. Di pihak Uni Eropa pembentukan ASEM merupakan *response* terhadap berbagai perkembangan pasca perang dingin seperti terkrystalisasinya apa yang disebut *the triangular world* (AS, Jepang dan Uni Eropa), kepesatan dinamika ekonomi dan bisnis Asia Pasifik, dan tuntutan dinamika internal Uni Eropa terutama setelah diberlakukannya mata uang tunggal. Di pihak Asia perlu dicatat sikap pro-aktif

ASEAN, hubungan Jepang dengan Uni Eropa serta kemunculan Cina sebagai kekuatan ekonomi global yang patut diperhitungkan.

Ketiga perspektif dalam ekonomi politik internasional (Robert Gilpin, 1987; 2000) dapat membantu kita untuk mengeksplorasi informasi analitik tentang ASEM. Perspektif *nationalis* yang menekankan peran *nation-state* mengembangkan argumentasi bahwa substansi dan arah kerjasama ASEM akan ditentukan oleh pertarungan kepentingan negara-negara besar yang dominan seperti Jepang, Jerman dan mungkin juga Cina. Selain itu perspektif ini akan fokus pada analisis persaingan antara negara-negara anggota. Meskipun ASEM mendengungkan prinsip *equal partnership*, hubungan internasional lebih sering didikte oleh kepentingan nasional daripada prinsip-prinsip yang abstrak. Perspektif liberal melihat ASEM sebagai manifestasi meningkatnya interdependensi ekonomi dan menekankan peran ASEM untuk memfasilitasi aktivitas *transnational capital* melalui liberalisasi perdagangan dan investasi. Kaum liberal mengajak setiap *participant* memaksimalkan peluang bisnis yang difasilitasi ASEM. Perspektif *Marxist* menganggap ASEM sebagai instrumen dari kelas kapitalis untuk mengeksploitasi kaum ekonomi lemah di negara-negara berkembang. Karena itu kaum *Marxist* mengingatkan kita akan ketimpangan sosial ekonomi sebagai akibat liberalisasi yang didukung oleh ASEM. Secara pragmatis kita bisa memilih untuk mengkombinasikan

penggunaan ketiga perspektif karena memberikan informasi yang berbeda, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita memilih salah satu dari ketiga perspektif tersebut. Perspektif apapun yang dipilih yang pasti pemerintah dan rakyat Indonesia perlu meningkatkan kiprahnya dalam kerangka ASEM sehingga kesejahteraan dan martabat kita tidak dikorbankan. Semoga.

<http://www.iiias.nl/asean/community/ngo/aepf.html> diakses 30 September 2003

<http://www.aseanconnect.com.sg/aboutus.html> diakses 30 September 2003

Referensi:

Buzan, B (1998) "The Asia Pacific: What Sort of Region in What Sort of World" dalam Anthony McGrew and Christopher Brrok (eds.) *Asia-Pacific in the New World Order*, London, Routledge

European Commission (2002) *ASEM 4: An Introduction to the Asia-Europe Meeting (ASEM)*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission.

European Commission (2002) "Communication from the Commission: A New Partnership with South East Asia" Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission.

Smith, M. (1998) "The European Union and the Asia Pacific" dalam Anthony McGrew and Christopher Brook *ibid.*

Web sites: http://europa.eu.int/external_relations/asean diakses tanggal 1 Oktober 2003